

**LAPORAN BARANG MILIK
NEGARA UNIT AKUNTANSI
KUASAPENGGUNA BARANG
(UAKPB) KPKNL JAKARTA II**

UNTUK PERIODE TAHUNAN
TAHUN ANGGARAN 2024

**CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
PADA UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG
KPKNL JAKARTA II
PERIODE TAHUNAN 2024**

I. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
- h. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012;
- j. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.06/2016;
- k. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016;
- l. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- n. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
- p. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2019;
- q. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;

- r. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 327/KM.06/2014 tentang Perubahan Kesembilan atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
- s. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud sebagaimana terakhir diubah melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KM.6/2018;
- t. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan BARang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
- u. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

2. Entitas Pelaporan

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah salah satu unit eselon I vertikal di bawah Kementerian Keuangan yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Barang Milik Negara, Kekayaan Negara dipisahkan, Kekayaan Negara Lain-Lain, Penilaian, Piutang Negara, dan Lelang yang berkewajiban menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara dengan menyusun Laporan Barang Milik Negara disertai dengan Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-E1).

3. Periode Laporan

Periode pelaporan untuk CaLBMN ini adalah periode Laporan Tahunan 2024.

II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, bahwa setiap Unit Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang (UPKPB) wajib menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) periode Tahunan maupun Semesteran kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Barang Milik Negara Ditjen Kekayaan Negara TAHUNAN 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan penatausahaan BMN, antara lain :

1. Penggolongan/kodefikasi berdasarkan kebijakan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 532/KM.06/2014 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
2. Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar (BAS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar. Aset Tetap dijabarkan dalam akun-akun yang disusun berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktifitas operasi. Selain itu, dengan diterapkannya penyusutan maka ada tambahan akun Akumulasi Penyusutan pada seluruh Aset Tetap kecuali pada Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan. Sedangkan Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi sebagaimana disajikan dalam akun Akumulasi Amortisasi
3. Terkait dengan kebijakan kapitalisasi atas aset tetap. Laporan Barang Milik Negara Ditjen Kekayaan Negara Tahunan 2024 ini telah disusun berdasarkan Lampiran VII pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
4. Adapun kebijakan rekonsiliasi berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana diubah dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

5. Kebijakan penyusutan BMN yang mulai dilaksanakan pada tahun anggaran 2013, berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.06/2019 tentang Tabel masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
6. Kebijakan Amortisasi BMN mulai dilaksanakan pada tahun anggaran 2016, berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat.

III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Milik Negara Tahunan 2024 UAPPB-E1 Ditjen Kekayaan Negara merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh unit KPKNL Jakarta II.

Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada Tahunan 2024 ini adalah sebesar Rp4.482.714.179 (empat miliar empat ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus empat belas ribu seratus tujuh puluh sembilan) yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp3.098.567.209 (Tiga Miliar sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus sembilan) dan nilai mutasi yang terjadi selama Tahunan 2024 sebesar 1.384.146.970 (1 miliar tiga ratus delapan puluh empat juta seratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah). Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan. sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.

Laporan Barang Pembantu Pengguna (LBPP E1) Tahunan 2024 merupakan himpunan dari Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) pada 90 (Sembilan puluh) Kuasa Pengguna Barang, yang terdiri atas 1 (satu) satker Kantor Pusat, 88 (delapan puluh delapan) satker Kantor Daerah dan 1 (satu) satker Badan Layanan Umum (sebagaimana daftar satker terlampir).

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel dan Gabungan);
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
5. Laporan Aset Tak Berwujud;
6. Laporan Barang Bersejarah;
7. Laporan Kondisi Barang;
8. Laporan Penyusutan;
9. Laporan Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
10. Laporan Barang Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
12. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara; dan
13. Laporan PNBPN yang terkait dengan pengelolaan BMN.

IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA TAHUNAN 2024

1. Saldo Awal Tahunan 2024

Nilai BMN per 1 Januari 2024 pada KPKNL Jakarta II adalah sebesar 3.098.567.209 (Tiga Miliar sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus sembilan) yang terdiri dari nilai BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan dalam Neraca) sebesar 3,095,618, (Tiga Miliar sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus sembilan).

2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara Tahunan 2024

a. Barang Persediaan

Saldo Persediaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp48.956.550 (empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp3.117.990 (tiga juta seratus tujuh belas ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) dan total mutasi persediaan selama periode laporan sebesar Rp45.838.560 (empat puluh lima juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
117111 Barang Konsumsi	3.117.990	45.838.560	48.956.550
Jumlah	3.117.990	45.838.560	48.956.550

b. Tanah

Saldo Tanah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna periode Tahunan 2024 sebesar Rp 0,0 (Nol Rupiah)/Nihil (Tidak memiliki tanah).

Rincian mutasi Tanah per bidang barang adalah sebagai berikut:

Uraian Jenis Transaksi	Jumlah (Rp)
Nihil	0,0

Mutasi Kurang Tanah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Jumlah (Rp)
Nihil	0,0

Dan jumlah/nilai tanah di atas, jumlah bidang tanah yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah 0 bidang dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 bidang dengan nilai sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

Rincian data tanah berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (m ²)
Baik	Nihil
Rusak Ringan	Nihil
Rusak Berat	Nihil

Tanah yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah Rp0,00 (Nol Rupiah). Tidak Terdapat permasalahan pada BMN berupa tanah yang dikuasai/ditatausahakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II.

c. Peralatan dan Mesin

Saldo Akhir Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp4.169.903.523 (empat miliar seratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp2.937.193.457 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta seratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah), mutasi tambah sebesar Rp2.105.446.970 (dua miliar seratus lima juta empat ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh), dan mutasi kurang sebesar Rp872.736.904 (delapan ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat).

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Jumlah	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	4	1,442,600,000	NIHIL
ALAT KANTOR	28	133,400,000	NIHIL
ALAT RUMAH TANGGA	87	499,546,970	NIHIL
KOMPUTER UNIT	2	11,900,000	NIHIL
ALAT KERJA PENERBANGAN	4	18,000,000	NIHIL

Mutasi Kurang tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Jumlah (Rp)
ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	721,300,000
ALAT RUMAH TANGGA	151,436,904

Berdasarkan rekapitulasi data perbandingan nilai BMN tersebut di atas, tidak terdapat selisih penyajian nilai BMN antara laporan barang dan laporan keuangan.

d. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00 (Nol rupiah)/ Nihil.

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang barang adalah sebagai berikut:

Uraian Jenis Transaksi	Jumlah (Rp)
Nihil	0,0

Mutasi Kurang Gedung dan Bangunan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Jumlah (Rp)
Nihil	0,0

Dan jumlah/nilai Gedung dan Bangunan di atas, jumlah bidang Gedung dan Bangunan yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah 0 bidang dengan nilai sebesar Rp0, 00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan /pemindahtanganan adalah 0 bidang dengan nilai sebesar Rp 0,00 (nol rupiah). Rincian data Gedung dan Bangunan berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (m ²)
Baik	Nihil
Rusak Ringan	Nihil
Rusak Berat	Nihil

Gedung dan Bangunan yang statusnya dihentikan dan penggunaan operasional pemerintah adalah m2/Rp 0,00 (Nol Rupiah). Tidak Terdapat permasalahan pada BMN berupa Gedung dan Bangunan yang dikuasai/ditatausahakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II.

e. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00 (Nol rupiah)/ Nihil (tidak memiliki Jalan dan Jembatan).

Rincian mutasi Jalan dan Jembatan per bidang barang adalah sebagai berikut:

Uraian Jenis Transaksi	Jumlah (Rp)
Nihil	0,0

Mutasi Kurang Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Jumlah (Rp)
Nihil	0,0

Dan jumlah/nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan di atas, jumlah bidang Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah 0 bidang dengan nilai sebesar Rp0, 00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan /pemindahtanganan adalah 0 bidang dengan nilai sebesar Rp 0,00 (nol rupiah). Rincian data Jalan, Irigasi, dan Jaringan berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (m ²)
Baik	Nihil
Rusak Ringan	Nihil
Rusak Berat	Nihil

f. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3,263,752,00 (tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah).

Mutasi Tambah Aset Tetap Lainnya tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Jumlah (Rp)
Nihil	0,0

Mutasi Kurang Aset Tetap Lainnya tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Jumlah (Rp)
Nihil	0,0

Dan jumlah/nilai Aset Tetap Lainnya di atas, jumlah Aset Tetap Lainnya yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar 11 Rp0,00 (nol) rupiah, sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 bidang dengan nilai sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

Rincian data Aset Tetap Lainnya berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Jumlah (Rp)
Baik	2	3.263.752
Rusak Ringan	Nihil	Nihil
Rusak Berat	Nihil	Nihil

Aset Tetap Lainnya yang statusnya dihentikan penggunaan operasional pemerintah adalah Rp 0,00 (Nol Rupiah). Tidak Terdapat permasalahan pada BMN berupa Aset Tetap Lainnya yang dikuasai/ditatausahakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II

Rincian Aset Tetap Lainnya per bidang barang adalah Barang Bercorak Kesenian (6.02.01) senilai Rp3.263.752(tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah)

g. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0 (nol/Nihil/Tidak memiliki barang Konstruksi dalam Pengerjaan). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rpxxxx. Penambahan sebesar Rp0 (nol/Nihil/Tidak memiliki barang Konstruksi dalam Pengerjaan).

h. Aset Lain lain

Saldo Aset Lain-lain pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00 (Nol rupiah)/ Nihil.

Mutasi Tambah Aset Lain-lain tersebut meliputi:

Mutasi Tambah Aset Tetap Lainnya tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Jumlah (Rp)
Nihil	0,0

Mutasi Kurang Aset Tetap Lainnya tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Jumlah (Rp)
Nihil	0,0

Dan jumlah/nilai Aset Lain-lain di atas, jumlah aset lain-lain yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah 0 bidang dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 bidang dengan nilai sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

Rincian data Aset lain-lain berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Jumlah (Rp)
Baik	Nihil	Nihil
Rusak Ringan	Nihil	Nihil
Rusak Berat	Nihil	Nihil

Aset Lain-lain yang statusnya dihentikan penggunaan operasional pemerintah adalah Rp 0,00 (Nol Rupiah). Tidak Terdapat permasalahan pada BMN berupa Aset Lain lain yang dikuasai/ditatausahakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II.

3. Barang Milik Negara pada Laporan Barang Pembantu Kuasa Pengguna DJKN Tahunan Tahun 2024

a. Nilai BMN Gabungan per akun neraca

Nilai BMN Gabungan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan tahun 2024 adalah sebesar Rp4.169.903.523 (empat miliar seratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah). Nilai BMN dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu: Peralatan dan Mesin, Aset Tetap Lainnya, Aset teta yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah.

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

KODE	URAIAN	INTRAKOMTABEL		EKSTRAKOMTABEL		GABUNGAN	
		NILAI	%	NILAI	%	NILAI	%
132111	Peralatan dan Mesin	4.166.955.123	99,9%	2.948.400	0,07%	4.169.903.523	100%
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	1.518.385.000	100,0%	-	0,00%	1.518.385.000	100%
30501	ALAT KANTOR	633.664.320	100,0%	-	0,00%	633.664.320	100%
30502	ALAT RUMAH TANGGA	724.869.503	99,6%	2.948.400	0,41%	727.817.903	100%
30601	ALAT STUDIO	58.460.679	100,0%	-	0,00%	58.460.679	100%
30602	ALAT KOMUNIKASI	2.600.000	100,0%	-	0,00%	2.600.000	100%
30701	ALAT KEDOKTERAN	2.036.100	100,0%	-	0,00%	2.036.100	100%
31001	KOMPUTER UNIT	920.794.648	100,0%	-	0,00%	920.794.648	100%
31002	PERALATAN KOMPUTER	288.144.873	100,0%	-	0,00%	288.144.873	100%
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	18.000.000	100,0%	-	0,00%	18.000.000	100%
135121	Aset Tetap Lainnya	3.263.752	100,0%	-	0,00%	3.263.752	100%
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	3.263.752	100,0%	-	0,00%	3.263.752	100%
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	309.546.904	100,0%	-	0,00%	309.546.904	100%

30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	158.110.000	100,0%	-	0,00%	158.110.000	100%
30502	ALAT RUMAH TANGGA	151.436.904	100,0%	-	0,00%	151.436.904	100%
TOTAL		4.479.765.779		2.948.400	0,07%	4.482.714.179	100 %

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna pada Tahunan tahun 2024 per perkiraan Neraca adalah sebagai berikut:

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		INTRAKOMTABEL	EKSTRAKOMTABEL	GABUNGAN
132111	Peralatan dan Mesin	2.582.206.276,	2.721.600,	2.584.927.876,
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	592.720.858,	0,	592.720.858,
30501	ALAT KANTOR	515.668.720,	0,	515.668.720,
30502	ALAT RUMAH TANGGA	323.546.580,	2.721.600,	326.268.180,
30601	ALAT STUDIO	53.610.679,	0,	53.610.679,
30602	ALAT KOMUNIKASI	2.600.000,	0,	2.600.000,
30701	ALAT KEDOKTERAN	2.036.100,	0,	2.036.100,
31001	KOMPUTER UNIT	820.470.898,	0,	820.470.898,
31002	PERALATAN KOMPUTER	270.652.441,	0,	270.652.441,
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	900.000,	0,	900.000,
135121	Aset Tetap Lainnya	0,	0,	0,
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	0,	0,	0,
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	309.546.904,	0,	309.546.904,
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	158.110.000,	0,	158.110.000,
30502	ALAT RUMAH TANGGA	151.436.904,	0,	151.436.904,
JUMLAH		2.891.753.180,	0,	2.891.753.180,

V. INFORMASI BMN LAINNYA

1. Matrix Data Pengelolaan BMN (PSP, Pemindahtanganan, Penghapusan, Pemanfaatan dll)

No	Uraian	Penggunaan	Pemanfaatan	Pemindah tanganan	Penghapusan	Jumlah
1	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengguna Barang					
2	Dalam Proses Pengajuan Permohonan ke Pengelola Barang			98	1	99
3	Dalam Prioses Pengelola Barang					
4	Selesai di Pengelola Barang					
	a. Dikembalikan					
	b. Ditolak					
	c. Disetujui					
5	Dalam proses tindak lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang					
6	Telah diterbitkan keputusan pengguna barang					
7	Tindaklanjut oleh kuasa pengguna barang					
8	Selesai serah terima					

4. BMN Dari Dana Dekonstrasi dan Tugas Pembantuan

Tidak terdapat BMN dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada UAKPB KPKNL Jakarta II untuk Tahun 2024.

5. BMN Berupa BPYBDS

Tidak terdapat BMN Berupa BPYBDS pada UAKPB KPKNL Jakarta II untuk tahun 2024.

Jakarta, 17 Januari 2025
Penanggung Jawab UAKPB
Kepala KPKNL Jakarta II



Ditandatangani secara elektronik
MOKHAMAD ARIF SETYAWANTIKA

